

ISSN : 1412-5331

MAJALAH ILMIAH  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG

# S O L U S I

Vol. 9 No. 1 Januari 2010

Perbedaan Penggunaan *Discriminant Function* dengan  
*Multivariate Analysis of Variance (MANOVA)* dan  
Penerapannya dalam Ilmu Ekonomi  
*Dyah Nirmala Arum Janie*

Pengaruh ROA, EPS, *Current Ratio*, DER dan Inflasi terhadap  
*Return Saham* (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur  
di BEI Periode Tahun 2006-2008)  
*Widyani Anik, Dian Indriana T.L.*

Pentingnya Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan  
*Ardiani Ika S*

Pengaruh *Procedural Justice* dan *Distributive Justice* terhadap  
Tingkat Eskalasi Komitmen dalam Penganggaran Modal dengan  
*Self Esteem* sebagai Variabel Intervening (Studi Eksperimen)  
*Andi Irfan*

Aplikasi Konsep Dasar Permintaan Pasar terhadap Pemasaran Produk  
(Studi Kasus Pemasaran Produk Televisi VCD)  
*Edy Suryawardana*

Identifikasi Indikator Penilaian Kinerja Karyawan untuk  
Menyusun Anggaran Berbasis Kinerja (Studi di Universitas  
Jenderal Soedirman dalam Rangka Perubahan Status menjadi  
Badan Layanan Umum 2010)  
*Irianing Suparlinah, Puji Lestari*

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah  
*Unun Dian Anggraeni, Yohanes Suhardjo*

Efisiensi Market dan Implikasinya  
*Dian Indriana T.L.*

Upaya Mempertahankan UMKM di Tengah Persaingan CAFTA  
*Evi Nurhidayati, Andy Kridasusila*

Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia Menghadapi ACFTA  
*Dian Prawitasari*

## SOLUSI

Mengkaji masalah-masalah sosial, ekonomi dan bisnis  
Terbitan 3 bulan sekali  
(Januari, April, Juli, Oktober)

**Penerbit :**  
**Fakultas Ekonomi Universitas Semarang**

**Pelindung :**  
**Rektor Universitas Semarang**

**Penanggungjawab .**  
**Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang**

**Dewan redaksi :**  
**Prof. Dr. Pahlawansjah Harahap, SE, ME (USM)**  
**Prof. Dr. Imam Ghozali M.Com, Hons.Akt (UNDIP)**  
**Prof. Supramono SE, MBA, DBA(UKSW)**  
**Prof. Dr. Dra. Sulastris ME. M.kom (UNISRI)**  
**Dr. Ir. Kesi Widjajanti SE MM (USM)**

**Redaktur Pelaksana :**  
**Andy Kridasusila SE MM**  
**Ardiani Ika S., SE MM Akt**  
**Adijati Utaminingsih SE MM**

**Sekretaris Redaksi :**  
**Amerti Irvin Widowati SE MSi Akt**

**Tata Usaha :**  
**Ali Arifin**

**Alamat Penerbit/Redaksi :**  
**Jl. Soekarno Hatta (Tlogosari)**  
**Telp. (024) 6702757, Fax. (024) 6702272**  
**SEMARANG – 50196**

Terbit Pertama kali : Juli 2002

## KATA PENGANTAR

Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, tatkala kami dapat hadir rutin setiap 3 bulan sekali untuk saling bertukar pikiran mengenai hal-hal baru di bidang ilmu ekonomi baik manajemen, akuntansi maupun studi pembangunan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca, pengirim artikel yang antusias untuk melakukan tukar pikiran dan berkomunikasi melalui media ini. Sekiranya hal ini dapat dipertahankan, maka selain kehadiran kami akan selalu dapat terlaksana dengan tepat waktu dan artikel yang beragam, wawasan pembaca juga akan semakin luas.

Penerbitan majalah ilmiah SOLUSI kali ini menghadirkan 10 (sepuluh) artikel yang telah kami anggap layak untuk diterbitkan, dengan harapan artikel-artikel ini dapat menjadi tambahan referensi bagi para pembaca dan menjadi sumbangan kami terhadap dunia ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu ekonomi bagi pengembangan organisasi swasta maupun institusi pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Hormat kami,

Redaksi

## SOLUSI

Vol. 9 No. 1 Januari 2010

ISSN : 1412-5331

### DAFTAR ISI

1. Perbedaan Penggunaan *Discriminant Function* dengan *Multivariate Analysis of Variance* (MANOVA) dan Penerapannya dalam Ilmu Ekonomi ..... 1 - 12  
*Dyah Nirmala Arum Janie*
2. Pengaruh ROA, EPS, *Current Ratio*, DER dan Inflasi terhadap *Return Saham* (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur di BEI Periode Tahun 2006-2008) 13 - 28  
*Widyani Anik, Dian Indriana T.L.*
3. Pentingnya Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan ..... 29 - 40  
*Ardiani Ika S*
4. Pengaruh *Procedural Justice* dan *Distributive Justice* terhadap Tingkat Eskalasi Komitmen dalam Penganggaran Modal dengan *Self Esteem* sebagai Variabel Intervening (Studi Eksperimen) ..... 41 - 47  
*Andi Irfan*
5. Aplikasi Konsep Dasar Permintaan Pasar terhadap Pemasaran Produk (Studi Kasus Pemasaran Produk Televisi VCD) ..... 49 - 56  
*Eay Suryawardana*
6. Identifikasi Indikator Penilaian Kinerja Karyawan untuk Menyusun Anggaran Berbasis Kinerja (Studi di Universitas Jenderal Soedirman dalam Rangka Perubahan Status menjadi Badan Layanan Umum 2010) ..... 57 - 68  
*Irianing Suparlinah, Puji Lestari*
7. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah ..... 69 - 81  
*Unun Dian Anggraeni, Yohanes Suhardjo*
8. Efisiensi Market dan Implikasinya ..... 83 - 93  
*Dian Indriana T.L.*
9. Upaya Mempertahankan UMKM di Tengah Persaingan CAFTA ..... 95 - 101  
*Evi Nurhidayati, Andy Kridasusila*
10. Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia Menghadapi ACFTA ..... 103 - 108  
*Dian Prawitasari*

### PEDOMAN PENULISAN NASKAH

# Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah

Oleh :

Unun Dian Anggraeni  
Yohanes Suhardjo  
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

## Pendahuluan

### Latar Belakang Masalah

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2000, merupakan kebijakan yang dipandang demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Seperti dikemukakan oleh Menteri Keuangan Budiono (dalam sidik et al, 2002:v), tujuan otonomi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Dalam UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 yang menjadi landasan otonomi tersebut dijelaskan lebih jauh bagaimana pengaplikasian hal-hal tersebut melalui beberapa Peraturan Pemerintah (PP), yang kemudian "dipandu" dengan Kepmendagri No. 29/2002 (Abdul Halim,2004).

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2000, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Dalam sidik et al, 2002, yang dikutip oleh Maemunah, 2006).

(Dalam Maimunah, 2006) Pada tahun 2004, dikeluarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah. Dalam UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, Pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan, dan lain-lain.

UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah berupa DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Pemda. Dana Bagi Hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antardaerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. Sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Diluar dari ketiga fungsi tersebut, untuk secara detailnya, penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

(Dalam Syukriy & Halim, 2003) Beberapa peneliti menemukan respon Pemda berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak). Artinya ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut *flypaper effect* (Oates, 1999 dalam Halim 2003).

Dalam Maimunah Mutiara (2006) banyak peneliti sebelumnya menganalisis pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah baik di Pulau Jawa, Bali, bahkan Sumatra. Pada hasil analisis di Pulau Sumatra, diperoleh hasil yaitu, PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap Belanja

Daerah. Hal tersebut berarti terjadi *Flypaper Effect*. Hal ini sesuai dengan hipotesisnya yang menyatakan pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap BD diterima. Hasil ini konsisten dengan temuan-temuan sebelumnya, seperti Aaberge & Langorgen (1997), Andersson (2002), Deller et al (2002), Legrenzi & Milas (2001), Zampelli (1986) dan Syukriy & Halim (2004).

(Dalam Syukriy & Halim, 2003) Holtz-Eakin et al (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antara transfer dari Pempus dengan Belanja Pemerintah Daerah. Studi Legrenzi & Milas (2001), menggunakan sampel *municipalities* di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemda dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linear* dan *asymmetric*.

(Dalam Syukriy & Halim, 2003) Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya Aziz et al; Von Furstenberg et al, 1986). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hyphotesis* (Aziz et al, 2000; Doi, 1998; Von furstenberg et al, 1998). Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan Pemerintahan Daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Syukriy & Halim (2003) dalam konteks internasional, beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan terhadap belanja (diantaranya adalah Cheng, 1999; Me Friedmen, 1978; Hoover & Sheffirin, 1992). Cheng (1999) menemukan bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus Pemda di beberapa negara Amerika Latin, yakni Kolumbia, Republik Dominika, Honduras, Paraguay. Friedmen (1978) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hal senada dikemukakan oleh Hoover & Sheffirin (1992), yang secara empiris menemukan adanya perbedaan hubungan dalam dua rentang waktu yang berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk data sesudah 1960-an pajak dan belanja tidak saling mempengaruhi (*causality independent*).

Abdul Halim dan Syukriy Abdullah (2003) pernah melakukan pengujian adanya *flypaper effects* pada belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa *flypaper effect* terjadi pada DAU periode t-1 terhadap Belanja Daerah periode t. Namun hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Indonesia. Karena menurut Penelitian Syukriy & Halim (2003) Pemda kabupaten/kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan Pemda kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Memperhatikan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Propinsi Jawa Tengah, karena karakteristik ekonomi yang sedang mengalami pertumbuhan semakin maju dan karena letak geografis Jawa Tengah yang berada di antara Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan D.I Yogyakarta, sehingga Propinsi Jawa Tengah ini merupakan daerah *transit* yang berusaha membangun sarana prasarana yang memadai baik jalur darat, laut, dan udara. Penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

### Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah?

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya Penelitian ini adalah :

Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

#### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu :

**Bagi Pemerintah Daerah.**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris mengenai penerapan sistem perimbangan daerah yang tengah berjalan dan dapat dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

**Bagi Dunia Pendidikan.**

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran kemajuan pendidikan. Serta bahan referensi data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

**Bagi Penulis**

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dari informasi yang di peroleh, serta menambah pengalaman peneliti dalam bidang penelitian ini.

#### **Definisi Pustaka**

##### **Dasar Teori**

##### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU ditetapkan sesuai Undang-Undang. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

Menurut UU No.33 Tahun 2004 Pasal 27 menyatakan :

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.

Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

##### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut UU No. 33 tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menandai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

**Hasil Pajak Daerah**

Menurut UU No.34 tahun 2000 tentang pajak daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbaru yaitu UU No.28 tahun 2009. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak propinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Sedangkan jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## 2) Hasil Retribusi Daerah

Menurut UU No.28 Tahun 2009, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

- a. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum misalnya: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar.

- b. Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha, misalnya : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dll.

- c. Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan tertentu, misalnya : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Periklanan.

## 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

## 4) Lain-lain PAD yang sah meliputi :

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
- b. jasa giro
- c. pendapatan bunga
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Belan

sebagi

disebu  
pengu  
mengi  
diperc

pelaks  
dari u  
yang  
daeral

l. B  
de

2. 1  
1

Ana

## Belanja Daerah

Belanja daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah menurut kelompok belanja terdiri dari:

### 1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- c. Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- d. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- e. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- h. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

### 2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- c. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai

manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

pemer  
menye  
akan c  
bertinc  
menya

### Otonomi Daerah

Otonomi Daerah menurut UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah.

mempu  
karena  
berper  
variasi  
varias

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab (Mardiasmo, 2001).

Asli C  
Indon-  
adalah

### Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Menurut UU No.33 Tahun 2004 Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Daera  
dilaku  
PAD,  
dengi

### Penelitian Terdahulu

Syukriy Abdullah dan Abdul Halim (2003) dalam Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah, studi kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara terpisah, DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, baik maupun tanpa lag. Ketika tidak digunakan tanpa lag, pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan digunakan lag, pengaruh DAU terhadap belanja daerah justru lebih kuat daripada PAD. Ketika kedua faktor (DAU dan PAD) diregresi serentak dengan belanja daerah, pengaruh keduanya juga signifikan, baik dengan ataupun lag.

Objek  
Peric  
Seca:

Kesit Bambang Prakosa (2004) tentang Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah, studi empirik di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah baik dengan maupun tanpa lag. Ketika tidak menggunakan lag, pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan digunakan lag, pengaruh DAU terhadap belanja daerah justru lebih kuat daripada PAD. Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dalam model prediksi BJD, daya prediksi DAU terhadap BJD tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Hal ini menunjukkan telah terjadi *flypaper effect*.

Met  
Vari:

Maimunah (2006) dalam Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Sumatera, pengaruh *flypaper* dapat digunakan dalam memprediksi Belanja Daerah periode ke depan, dan tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PAD-nya tinggi maupun pada daerah yang PAD-nya rendah di Kabupaten/Kota di pulau Sumatera.

Jeni:  
Data  
Ant  
men  
Ten  
Ten

Rochman (Skripsi, 2007) dalam Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (2001-2005). Kesimpulan Berdasarkan pengujian secara individual dengan menggunakan uji t, variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan, dengan demikian hipotesis terbukti. Untuk DAU berpengaruh positif, hal tersebut bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja

Met  
dok  
Kat  
met

Me  
stat  
Au  
reg

pemerintah daerah. Menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer pemerintah pusat akan menyebabkan penurunan pengeluaran daerah dan begitu juga sebaliknya peningkatan alokasi transfer akan diikuti dengan pengeluaran yang lebih tinggi. Gejala ini memperlihatkan bahwa pemerintah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat. Untuk PAD berpengaruh positif, menyatakan bahwa kenaikan pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Untuk uji kebaikan model (uji F dan  $R^2$ ) menunjukkan bahwa model cukup bagus karena secara bersama-sama variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan besarnya nilai  $R^2$  sebesar 0.282937 berarti 28,29% variasi variabel independen (Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah) mampu menjelaskan variasi dependen (Belanja Daerah).

Novi Pratiwi (Skripsi, 2007) dalam Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Hasil pengujian hipotesis pertama adalah diterima, artinya Dana Alokasi Umum dengan  $lag\ 1$  tahun ( $DAU_{t-1}$ ) mempengaruhi besarnya prediksi Belanja Daerah ( $BD_t$ ). Hasil pengujian hipotesis kedua juga diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah dengan  $lag\ 1$  tahun ( $PAD_{t-1}$ ) mempengaruhi besarnya prediksi Belanja Daerah ( $BD_t$ ). Apabila dilakukan pengujian secara serentak tampak bahwa pengaruh  $DAU_{t-1}$  lebih kuat daripada pengaruh  $PAD_{t-1}$ , hal tersebut membuktikan bahwa terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah di Indonesia, dengan demikian hipotesis ketiga juga diterima.

Beda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

Objek Penelitian : Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah  
Periode Penelitian : Tahun 2006

Secara ringkas penelitian terdahulu terdapat pada tabel dibawah ini :

### Metodologi Penelitian

#### Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah Belanja Pemerintah Daerah (Belanja Pemda), dan variabel bebas (*independent variables*) adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2006. Data sekunder menurut Anton Dajan (1995) adalah data yang dikumpulkan pihak lain, digunakan oleh peneliti untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Sampel data adalah 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah.

#### Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yaitu metode tabulasi dan dokumentasi. Dimana pengumpulan data diperoleh dari dokumentasi APBD Pemerintah Daerah 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah lalu dikumpulkan menjadi dokumen yang sudah diolah sedangkan metode tabulasi digunakan untuk mempermudah perhitungan analisa.

#### Metode Analisis Data

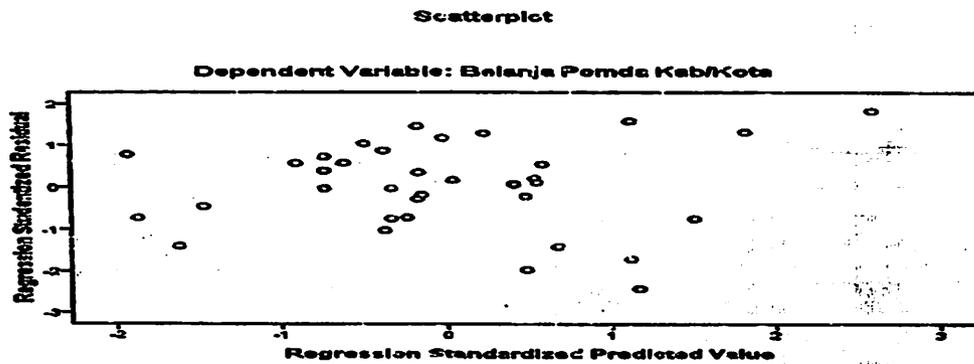
Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Statistik menggunakan *SPSS 16.0*. Alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik (Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas data), regresi sederhana (*simple regression*) dan regresi berganda (*multiple regressions*) : Koefisien determinasi, uji t, uji F.

Tabel 1  
Hasil Uji Multikolinearitas  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		R	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.060E7	2.007E7		.528	.601		
	Dana Alokasi Umum	.967	.048	.768	2.022E1	.000	.886	1.129
	Pendapatan Asli Daerah	1.747	.165	.401	1.057E1	.000	.886	1.129

a. Dependent Variable: Belanja Pemda Kab/Kota

**Uji Heteroskedastisitas**



An  
Re

**Uji Autokorelasi**

Hasil Uji Autokorelasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.979 <sup>a</sup>	.959	.957	3.119E7	1.942

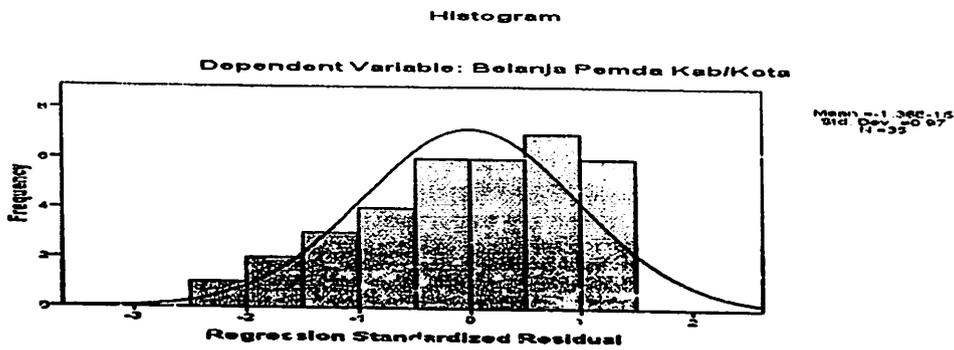
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Pemda Kab/Kota

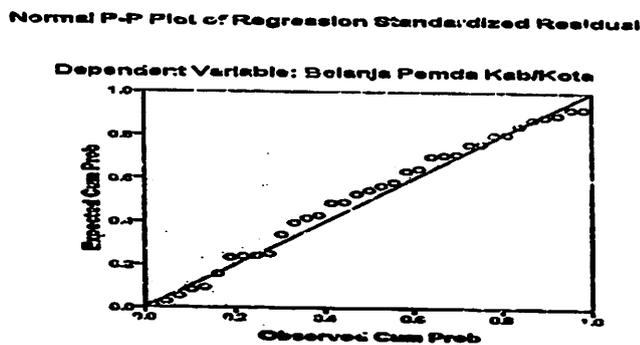
1  
1  
a

Uji Normalitas Data

Gambar 1  
Grafik Histogram



Gambar 2  
Grafik Normal P-P Plot



Analisis Regresi

Regresi Sederhana : Pengaruh DAU Terhadap BELANJA PEMDA

Tabel 2  
Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.904 <sup>a</sup>	.817	.811	6.508E7

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Pemda Kab/Kota

Tabel 3  
Hasil Uji t-statistik  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.309E7	4.163E7		.795	.432
	Dana Alokasi Umum	1.138	.094	.904	12.118	.000

a. Dependent Variable: Belanja Pemda Kab/Kota

Regresi Sederhana : Pengaruh PAD Terhadap BELANJA PEMDA

Tabel 4  
Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.661 <sup>a</sup>	.437	.420	1.140E8

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Pemda Kab/Kota

Tabel 5  
Hasil Uji t-statistik  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.622E8	3.660E7		9.897	.000
	Pendapatan Asli Daerah	2.878	.569	.661	5.061	.000

a. Dependent Variable: Belanja Pemda Kab/Kota

Analisis Regresi Berganda: Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemda (Simultan)

Tabel 6  
Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.979 <sup>a</sup>	.959	.957	3.119E7

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Pemda Kab/Kota

Tabel 7  
Hasil Uji t-statistik  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.060E7	2.007E7		.528	.601
	Dana Alokasi Umum	.967	.048	.768	20.217	.000
	Pendapatan Asli Daerah	1.747	.165	.401	10.567	.000

a. Dependent Variable: Belanja Pemda Kab/Kota

Tabel 8  
 Hasil Uji Statistik F  
 ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.306E17	2	3.653E17	375.435	.000 <sup>a</sup>
	Residual	3.114E16	32	9.730E14		
	Total	7.617E17	34			

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Pemda Kab/Kota

### Kesimpulan

1. Hasil pengujian hipotesis pertama adalah diterima, artinya Dana Alokasi Umum mempengaruhi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Jika ada peningkatan jumlah DAU, maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah Belanja Pemda yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua juga diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Jika ada peningkatan jumlah PAD, maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah Belanja Pemda yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga juga diterima, artinya secara bersama-sama (simultan) DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Dari hasil regresi diatas dapat dilihat bahwa DAU dan PAD benar-benar memberikan pengaruh terhadap Belanja Pemda bahkan pada saat DAU dan PAD di regresi secara serempak hasilnya juga menunjukkan adanya pengaruh terhadap Belanja Pemda dan dari hasil perbandingan yang menunjukkan bahwa nilai t-statistik, F-statistik dan Adjusted R<sup>2</sup> masing-masing variabel (regresi) dari DAU lebih besar dari PAD terlihat bahwa pengaruh DAU terhadap Belanja Pemda lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Pemda.

### Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang tertarik dan berkecimpung dengan masalah anggaran yang dalam hal ini adalah APBD.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menggugah para peneliti berikutnya untuk mendalami kandungan informasi dari sebuah laporan keuangan yang dikaitkan dengan disiplin atau cabang ilmu lainnya.

Pemerintah daerah seharusnya dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari. Dengan mengoptimalkan pajak daerah yang selama ini menjadi sumber terbesar PAD, caranya dengan pendataan kembali wajib pajak dan objek pajak yang sudah ada dalam rangka penggalan potensi daerah serta meningkatkan pelayanan atau fasilitas yang dapat dinikmati masyarakat dan pemerintah. Contohnya dengan menyediakan layanan *online* pada sistem perpajakan.

Dan dari penelitian ini juga diharapkan agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga suatu daerah benar-benar dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dengan penelitian diatas, dapat diketahui bahwa besarnya Belanja Pemda lebih banyak dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi, daripada tingkat Pendapatan Asli Daerah sendiri. Jika hal ini masih terus berlanjut maka dikhawatirkan pelaksanaan otonomi daerah akan terhambat.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya, yang mungkin masih terdapat variabel-variabel lain yang merupakan faktor penting dalam manajemen keuangan dan penganggaran daerah. Keterbatasan-keterbatasan studi ini adalah:

1. Dari 434 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, yang diteliti hanya 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah periode tahun 2006. Hal ini karena keterbatasan data dan kemampuan penulis. Sehingga untuk penelitian berikutnya agar menggunakan sampel yang lebih banyak dengan periode yang lebih panjang agar penelitian lebih obyektif.
2. Variabel yang diteliti hanya menggunakan dua variabel yang mempengaruhi Belanja Pemerintah Daerah (BD) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga bagi peneliti selanjutnya agar memasukkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Belanja Daerah (misalnya, Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus, dll)
3. Studi ini tidak menganalisis lebih jauh efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran (misalnya tidak mempertimbangkan jumlah, struktur usia, dan tingkat pendidikan pegawai dan penduduk).

### **Implikasi Penelitian Selanjutnya**

1. Hendaknya Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki melihat kebutuhan serta memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
2. Dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pemberian DAU kepada daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah bukan hanya untuk menutup celah fiskal yang ada pada kemampuan keuangan daerah, namun juga sebagai sumber penerimaan utama untuk membiayai belanja. Bagi Pemerintah Daerah agar lebih mampu meningkatkan PAD dengan melakukan inovasi dan menggali potensi daerah di luar pajak daerah, sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani oleh pajak, dan PAD yang dihasilkan mampu membiayai belanja daerah itu sendiri.
3. Untuk hasil penelitian yang lebih valid sebaiknya mendapatkan data yang lebih terpercaya dengan menambah tempat pencarian data sehingga data yang didapat beragam dan dapat dikomparasikan.
4. Menambah literatur sebagai panduan bukan hanya dari buku tetapi juga dari internet dan media informasi lainnya.

### **Daftar Pustaka :**

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemda : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi : 1140-1159. Surabaya, 16-17 Oktober 2003.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2006.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, edisi Keempat. Semarang: BP Undip.
- Halim, Abdul. 2001. Anggaran Daerah dan "Fiscal Stress" (Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Propinsi di Indonesia). Jurnal Ekonomi, dan Bisnis Indonesia 16(4) : 346-357.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik "Akuntansi Keuangan Daerah", edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX : K-ASPP04 Hal 1-27. Padang, 23-26 Agustus 2006.

Maulida, Novi Pratiwi. 2007. **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah : Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Indonesia.** Skripsi Sarjana . Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prakosa, Kesit Bambang. 2004. **Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY).** JAAI Vol. 8 No. 2.

Rochman. 2007. **Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.** Skripsi Sarjana . Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<http://www.google.com>

<http://www.skripsi-tesis.htm>